

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Amiruddin Ali dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012.
- Bambang Sugono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers. 2012.
- Burhan Ashofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Djisman Samosir, *Sekelumit tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Rafika Aditama : Bandung, 2009.
- Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Semarang: Satjipto Rahardji Institute, 2012.
- Iqrak Sulhin, *Diskontinuitas Penologi Punitif Sebuah Analisis Genealogis Terhadap Pemenjaraan*, Jakrta: Kencana, 2016.
- J.E Sahetapy. *Hukum Pidana*. Yogyakarta : Liberty. 1995.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2008.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, 2010.
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Sabian Ustman. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif : Pengembangan Permasalahan Penelitian Hukum (Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014.
- Sabian Ustman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif : Pengembangan Permasalahan Penelitian Hukum (Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2012.

Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. 1986.

Soejono Soekanto. Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: P.T Raja Grafindo. 2011.

Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaanya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjajaran:Bandung, 2009.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2010.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PL.01.01 Tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan.

Keputusan Mentri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan.

Keputusan Direktorat Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-461.PK.01.04.01 Tahun 2015 tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas dan Rutan.

Website Internet

<http://www.antaranews.com/berita/80066/tiga-terpidana-mati-bobol-lp-muaro-padang>

<http://www.antaranews.com/berita/431180/lima-napi-di-lapas-biaro-bukittinggi-kabur>

<http://riaupos.co/76529-arsip-tujuh-tahanan-lari-dari-lp-sijunjung-salah-satunya-sering-beroperasi-di-kampar.html#.Vtua7rFQHIU>

<http://harianhaluan.com/mobile/detailberita/45031/dalam-sepekan-lp-bukittinggi-dua-kali-dibobol>

<http://www.gosumbar.com/berita/baca/2015/12/30/lagi-lima-napi-kabur-dari-lp-biaro-kelas-ii-a-bukittinggi#sthash.ODe9eh4j.dpbs>

<http://hariansinggalang.co.id/diizinkan-nikahkan-anak-napi-lapas-biaro-kabur/>

<http://m.antaranews.com/berita/552778/tambahan-petugas-lapas-menkumham-usulkan-11-ribupegawai-pegawai-baru>

